



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG  
SISTEM DAN PROSEDUR POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu diganti dengan Peraturan Gubernur yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 9) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
3. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
6. OPD yang menerapkan PPK BLUD selanjutnya disingkat BLUD-OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerapkan PPK BLUD.
7. Unit Kerja pada OPD yang menerapkan PPK BLUD yang selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerapkan PPK BLUD.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaranyang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

10. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DPA BLUD.
11. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pimpinan BLUD pada Bank Umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLU
12. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
13. Kelebihan target pendapatan adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan target pendapatan jasa layanan PPK BLUD.
14. Surplus adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD yang bersumber dari jasa layanan pada satu tahun anggaran
15. Defisit adalah selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD yang bersumber dari jasa layanan pada satu tahun anggaran.
16. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
17. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
18. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

## Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD untuk melakukan pengelolaan keuangan.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan BLUD yang meliputi :

- a. Perencanaan dan Penganggaran BLUD;
- b. Penatausahaan keuangan BLUD; dan
- c. Pelaporan keuangan BLUD.

BAB II  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BLUD

Pasal 4

- (1) BLUD berkewajiban menyusun perencanaan dan penganggaran meliputi :
  - a. Rencana Strategi Bisnis BLUD;
  - b. RBA BLUD; dan
  - c. DPA BLUD.
- (2) BLUD menyusun Rencana Strategi Bisnis, dengan berpedoman pada sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rencana Strategi Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (4) Penyusunan RBA berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penyusunan RBA pada perencanaan biaya berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa.

Pasal 5

- (1) Untuk BLUD OPD, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Untuk BLUD Unit Kerja, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-OPD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipersamakan sebagai RKA OPD/RKA-Unit Kerja.

Pasal 6

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 7

- (1) Hasil telaah RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikonsolidasikan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, RBA disesuaikan menjadi RBA Definitif dan sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD diajukan dan disahkan oleh PPKD.

- (3) Dalam hal RBA Definitif belum ditetapkan, PPK BLUD dapat membelanjakan sesuai dengan fleksibilitas pengeluaran berdasar ambang batas yang ditetapkan dalam RBA.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan kondisi yang menyebabkan bertambahnya kebutuhan biaya pada PPK BLUD, dapat melakukan perubahan DPA BLUD dengan mekanisme persetujuan TAPD.

#### Pasal 8

- (1) Ambang Batas RBA ditetapkan dengan besaran persentase dari pendapatan jasa layanan yang tercantum dalam RBA dan DPA tahun anggaran yang dianggarkan.
- (2) Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila volume kegiatan pelayanan dan Pendapatan Jasa Layanan, Hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang dianggarkan.
- (3) Perhitungan persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain kecenderungan naik/turun selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan realisasi dua tahun anggaran sebelumnya, serta selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan prognosa tahun anggaran berjalan.
- (4) Rumusan persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 9

BLUD bertahap dapat mengajukan perubahan RBA dan DPA BLUD, berkaitan dengan terjadinya penambahan pendapatan dan biaya pada Tahun Anggaran berjalan, kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

#### Pasal 10

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

#### Pasal 11

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (duabelas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.

- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis, pada Bank Umum yang sehat;
  - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
  - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
  - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
  - c. berisiko rendah.
- (5) Investasi jangka panjang harus dengan persetujuan Gubernur.

### BAB III PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD

#### Pasal 12

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan :
  - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
  - d. pembayaran;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan, bekerjasama dengan Bank Umum yang sehat.
- (2) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas bersumber dari :
  - a. Jasa layanan;
  - b. hibah;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
  - f. pendapatan lainnya yang sah.
- (3) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f dilaksanakan melalui rekening kas PPK BLUD.
- (4) Penerimaan BLUD setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

#### Pasal 13

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.

- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku untuk BLUD bertahap.

#### Pasal 14

- (1) Pimpinan PPK BLUD wajib menyusun peraturan tentang penatausahaan keuangan dan kebijakan akuntansi untuk PPK BLUD, yang bersumber dari jasa layanan, dan disampaikan pada PPKD.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan asset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

#### Pasal 15

- (1) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 16

- (1) PPK BLUD dapat menggunakan Surplus tahun lalu dari jasa layanan untuk peningkatan pelayanan, dengan ijin Gubernur.
- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan dalam Tahun Anggaran berikutnya untuk kebutuhan wajib dan mengikat.
- (3) Penggunaan kebutuhan wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tercantum dalam RBA Tahun Anggaran berikutnya.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal BLUD mengalami Surplus pada rekening kas BLUD maka penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kegiatan di tahun berikutnya, dengan mekanisme sesuai penatausahaan BLUD.
- (2) Penetapan perkiraan Surplus pada Rekening Kas BLUD, memperhatikan realisasi semester 1 dan prognosa semester 2 tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 18

Dalam hal BLUD mempunyai Surplus dari jasa layanan, Gubernur dapat memerintahkan pemindahbukuan Surplus BLUD dari rekening kas di BLUD ke rekening kas daerah, dengan mempertimbangkan likuiditas BLUD.



BAB IV  
PELAPORAN KEUANGAN BLUD

Pasal 19

- (1) Pimpinan PPK BLUD wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Gubernur melalui PPKD terdiri dari :
  - a. Laporan operasional dan laporan arus kas setiap triwulan.
  - b. Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja setiap semester.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD.
- (3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai pedoman penyusunan RBA BLUD.
- (4) Penyusunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- (5) Dalam hal PPK BLUD Unit Kerja, Laporan Kinerja merupakan satu kesatuan dengan OPD yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Laporan Keuangan BLUD-OPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan Keuangan BLUD-Unit Kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan OPD.
- (3) Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan BLUD-OPD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, BLUD-OPD menyampaikan Laporan Keuangan kepada PPKD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) setiap semester dan setiap tahun.
- (4) Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan BLUD Unit Kerja dengan Laporan Keuangan OPD, BLUD Unit Kerja menyampaikan Laporan Keuangan kepada OPD sesuai dengan SAP setiap semester dan setiap tahun.
- (5) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) terdiri dari:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - b. Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
  - c. Neraca, Laporan Arus Kas (LAK); dan
  - d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dilampiri dengan Laporan Keuangan yang sesuai SAK/standar akuntansi industri spesifik.

Pasal 21

- (1) BLUD mengembangkan Sub Sistem Akuntansi Keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), untuk pengintegrasian Laporan Keuangan BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam hal Sub Sistem Akuntansi Keuangan BLUD Unit Kerja /OPD belum dapat menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi dengan Laporan Keuangan OPD/Pemerintah Daerah, BLUD Unit Kerja/OPD melakukan konversi Laporan Keuangan BLUD Unit Kerja/OPD berdasarkan SAK ke dalam Laporan Keuangan berdasarkan SAP.
- (3) Proses konversi mencakup pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan atas akun-akun neraca dan laporan operasional.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 Januari 2016  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD  
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 Januari 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD  
ICHSANURI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBENUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR  
TENTANG  
SISTEM DAN PROSEDUR  
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGI BISNIS

## **HALAMAN SAMPUL**

**PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.....**

**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN .....**

## KATA PENGANTAR

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ..... 20XX

Pemimpin BLUD.....

(.....)



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Gambaran Umum .....	
B. Maksud dan Tujuan.....	
C. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas .....	
<b>BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN</b> .....	<b>1</b>
A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja .....	
1. Faktor Internal .....	
2. Faktor Eksternal .....	
B. Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran dengan Fakta yang Terjadi .....	
1. Aspek Makro .....	
2. Aspek Mikro .....	
C. Pencapaian Kinerja.....	
1. Non Keuangan .....	
2. Keuangan .....	
a. Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Layanan .....	
b. Realisasi Biaya Berdasarkan Unit Layanan.....	
c. Realisasi Biaya BLUD .....	
d. Pencapaian Investasi .....	
e. Pencapaian Pendanaan.....	
D. Prognosa Laporan Keuangan.....	
1. Neraca .....	
2. Laporan Operasional .....	
3. Laporan Arus Kas .....	
4. Catatan atas Laporan Keuangan .....	
<b>BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN</b> .....	
A. Kondisi Lingkungan yang Diprediksi akan Mempengaruhi Pencapaian Kinerja .....	
1. Faktor Internal .....	
2. Faktor Eksternal .....	
B. Asumsi yang Digunakan .....	
1. Aspek Makro .....	
2. Aspek Mikro .....	
C. Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Kegiatan Pelayanan.....	
D. Program Kerja dan Kegiatan .....	
1. Program Kerja.....	
2. Kegiatan Pelayanan (diisi apa domaint pelayanan yang diberikan) .....	
E. Perkiraan Pendapatan .....	
1. Pendapatan Kegiatan Pelayanan.....	
4. Penerimaan Investasi.....	
3. Penerimaan Pendanaan.....	
F. Perkiraan Biaya .....	

---

<sup>1</sup> Diisi Tahun Anggaran Berjalan

	1.	Biaya Pelayanan .....	
	2.	Pengeluaran Investasi .....	
	3.	Pengeluaran Pendanaan .....	
G.		Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Investasi untuk Kegiatan Pelayanan .....	
H.		Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan untuk Kegiatan Pelayanan .....	
I.		Anggaran Badan Layanan Umum Daerah .....	
	1.	Anggaran Pendapatan .....	
	2.	Anggaran Biaya.....	
	3.	Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Investasi.....	
	4.	Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan.....	
J.		Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran.....	
<b>BAB</b>	<b>IV</b>	<b>PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN .....</b>	<b>2</b>
	A.	Proyeksi Neraca .....	
	B.	Proyeksi Laporan Operasional .....	
	C.	Proyeksi Laporan Arus Kas.....	
	D.	Catatan atas Proyeksi Laporan Keuangan .....	
<b>BAB</b>	<b>V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	
	A.	Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah .....	
	B.	Kesimpulan .....	
<b>LAMPIRAN</b>		.....	

---

<sup>2</sup> Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan.



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Gambaran Umum**

.....  
.....  
.....

## **B. Maksud dan Tujuan**

.....  
.....  
.....

## **C. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas**

.....  
.....  
.....

## BAB II

### KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN .....<sup>3</sup>

**A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja**

**1. Faktor Internal**

.....  
.....

**2. Faktor Eksternal**

.....  
.....

**B. Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran dengan Fakta yang Terjadi**

**1. Aspek Makro**

No	Unsur	Asumsi TA Berjalan	Fakta TA Berjalan	Ket
1	2	3	4	5
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)			
2.	Tingkat inflasi (%)			
3.	Pertumbuhan pasar (%)			
4.	Tingkat suku bunga pinjaman (%)			
5.	Kurs (Rp)			
6.	Dst .....			

*Catatan: uraian diatas dapat mengacu pada indikator ekonomi setempat*

**2. Aspek Mikro**

No	Unsur	Asumsi TA Berjalan	Fakta TA Berjalan	Ket
1	2	3	4	5
1.	Pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi <i>Public Service Obligation (PSO)</i>			
2.	Kenaikan tarif layanan			
3.	Pengembangan/peningkatan layanan			
4.	Asumsi berkaitan dengan analisis rasio keuangan.			
5.	Dst .....			

**C. Pencapaian Kinerja**

**1. Non Keuangan**

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Target Kinerja TA Berjalan	Realisasi s.d 30 Juni... (Rp)	Prognosa s.d 31 Desember... (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	.....					
2.	.....					
3.	.....					
4.	Dst .....					

*Uraian Pencapaian Kinerja:*

.....  
.....  
.....

<sup>3</sup> Diisi Tahun Anggaran Berjalan.

## 2. Keuangan

### a) Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Layanan

No	Unit Layanan	Anggaran Tahun Berjalan (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni ... (Rp)	Prognosa s.d 31 Desember ... (Rp)	Selisih (%)
1	2	3	4	5	$6=(3-5)/3$
1	.....				
2	.....				
3	.....				
4	Dst .....				
	<b>Jumlah</b>				

*Uraian Pencapaian Kinerja:*

.....  
 .....  
 .....

### b) Realisasi Biaya Berdasarkan Unit Layanan<sup>4</sup>

No	Unit Layanan	Anggaran Tahun Berjalan (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni..... (Rp)	Prognosa s.d 31 Desember.... (Rp)	Selisih (%)
1	2	3	4	5	$6=(3-5)/3$
1	.....				
2	.....				
3	Dst .....				
	<b>Jumlah</b>				

*Uraian Pencapaian Kinerja:*

.....  
 .....  
 .....

### c) Realisasi Biaya BLUD

Komponen Biaya	Anggaran Thn Berjalan	Realisasi s/d 30 Juni....	Prognosa s/d 31 Des....	Capaian	Ket
1	2	3	4	$5=(4)/(2)$	6
<b>A. Biaya Pelayanan</b>					
1. Biaya pegawai					
2. Biaya bahan <sup>5</sup>					
3. Biaya jasa pelayanan					
4. Biaya pemeliharaan					
5. Biaya barang dan jasa					
6. Biaya depresiasi					
7. Biaya pelayanan lainnya					
<b>B. Biaya Umum Dan Administrasi</b>					
1. Biaya pegawai					
2. Biaya administrasi kantor					
3. Biaya pemeliharaan					
4. Biaya barang dan jasa					
5. Biaya promosi					

<sup>4</sup> Optional

<sup>5</sup> Termasuk harga pokok barang yang dijual.

Komponen Biaya	Anggaran Thn Berjalan	Realisasi s/d 30 Juni....	Prognosa s/d 31 Des....	Capaian	Ket
1	2	3	4	5=(4)/(2)	6
6. Biaya depresiasi					
7. Biaya umum dan administrasi lainnya.					
<b>C. Biaya Non Operasional</b>					
1. Biaya bunga					
2. Biaya administrasi bank					
3. Kerugian penjualan aset					
4. Kerugian penurunan nilai					
5. Biaya non operasional lainnya					
<b>Jumlah Biaya (A+B+C)</b>					

*Uraian Pencapaian Kinerja:*

.....  
 .....

**d) Pencapaian Investasi**

**1) Penerimaan Investasi**

No	Jenis Investasi	Anggaran Tahun Berjalan (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni..... (Rp)	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=(4)/(3)	6
<b>1.</b>	<b>Pelepasan aset</b>				
a.	Kendaraan				
b.	Mesin				
c.	Dst.....				
<b>2.</b>	<b>Pencairan investasi</b>				
a.	Pencairan deposito				
b.	Penjualan surat berharga				
c.	Dst.....				
	<b>Jumlah</b>				

*Uraian Pencapaian Kinerja:*

.....  
 .....

## 2) Pengeluaran Investasi

No	Jenis Investasi	SUMBER DANA, ANGGARAN, DAN REALISASI														Capaian (%)	Ket		
		Jasa layanan		Hibah		Kerjasama		APBD		APBN		Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		Penggunaan Sisa Kas (Surplus)				Jumlah	
		Anggaran Tahun berjalan	Realisasi Sd...	Anggaran Tahun berjalan	Realisasi Sd...	Anggaran Tahun berjalan	Realisasi Sd ...	Anggaran Tahun berjalan	Realisasi Sd ...	Anggaran Tahun berjalan	Realisasi Sd..	Anggaran Tahun berjalan	Realisasi Sd ...	Anggaran Tahun berjalan	Realisasi Sd ...				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	
1.	Tanah																		
2.	Peralatan dan mesin																		
3.	Gedung dan bangunan																		
4.	Kendaraan																		
5.	Perlengkapan dan peralatan kantor																		
6.	Jalan, irigasi, dan jaringan																		
7.	Aset sewa guna usaha																		
8.	Surat utang <sup>6</sup> dan surat modal <sup>7</sup> .																		
9.	Deposito jangka waktu lebih dari 12 bulan																		
10.	Sistem Informasi																		
11.	Dst.....																		
	<b>Jumlah</b>																		

*Uraian Pencapaian Kinerja:*

.....  
 .....

<sup>6</sup> Contoh surat utang: SUN (Surat Utang Negara), pembelian obligasi, SBI (Sertifikat Bank Indonesia)

<sup>7</sup> Contoh surat modal: Saham

**e) Pencapaian Pendanaan**

**1) Penerimaan Pendanaan**

No	Jenis Pendanaan	Anggaran Tahun Berjalan (Rp)	Realisasi s.d..... (Rp)	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=(4)/(3)	6
1.	Penarikan Pinjaman dari ....				
2.	Dst.....				
	<b>Jumlah</b>				

*Uraian Pencapaian Kinerja:*

.....  
.....  
.....

**2) Pengeluaran Pendanaan**

No	Jenis Pendanaan	Anggaran Tahun Berjalan (Rp)	Realisasi s.d..... (Rp)	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=(4)/(3)	6
1.	Pembayaran utang kepada.....				
2.	Dst.....				
	<b>Jumlah</b>				

*Uraian Pencapaian Kinerja:*

.....  
.....  
.....

**A. Prognosa Laporan Keuangan**

**1. Neraca**

**NERACA**  
**PER .....**<sup>8</sup>

*( dalam ribuan rupiah )*

Uraian	Tahun 2xx(n-1)	Tahun Berjalan (2xxn)			
		Anggaran Per 31 Desember (RP)	Realisasi Per ..... (RP)	Prognosa Per 31 Desember (RP)	Selisih
1	2	3	4	5	6=(5-3)
<b>I. ASET</b>					
<b>A. Aset Lancar</b>					
1. Kas dan setara kas					
2. Investasi jangka pendek					
3. Piutang usaha					
4. Piutang lain-lain					
5. Persediaan					
6. Uang muka					
7. Pendapatan yang masih harus diterima					
8. Dst .....					
<b>Jumlah Aset Lancar</b>					
<b>B. Investasi Jangka Panjang</b>					
<b>C. Aset Tetap</b>					
1. Tanah					
2. Peralatan dan mesin					
3. Gedung dan bangunan					
4. Kendaraan					
5. Perlengkapan dan peralatan kantor					
6. Jalan, irigasi, dan jaringan					
7. Dst .....					
<b>Jumlah Aset Tetap</b>					
<b>Akumulasi penyusutan</b>					
<b>Nilai buku aset tetap</b>					
<b>D. Aset Lain-lain.</b>					
1. Aset tak berwujud					
2. Konstruksi dalam pengerjaan					
3. Dst.....					
<b>Jumlah Aset Lain-lain</b>					
<b>Jumlah Aset (A+B+C+D)</b>					
<b>II. KEWAJIBAN</b>					
<b>A. Kewajiban Jangka Pendek</b>					
1. Utang usaha					
2. Utang pajak					
3. Biaya yang masih harus dibayar					
4. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun					
5. Pendapatan yang diterima dimuka					
6. Dst.....					
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>					

<sup>8</sup> Diisi sesuai dengan tanggal penutupan Neraca.

Uraian	Tahun 2xx(n-1)	Tahun Berjalan (2xxn)			
		Anggaran Per 31 Desember (RP)	Realisasi Per ..... (RP)	Prognosa Per 31 Desember (RP)	Selisih
1	2	3	4	5	6=(5-3)
<b>B. Kewajiban Jangka Panjang</b>					
1. Utang jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun					
2. Dst .....					
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>					
<b>Jumlah Kewajiban (A+B)</b>					
<b>III. EKUITAS</b>					
1. Ekuitas tidak terikat					
a. Ekuitas Awal					
b. Surplus (Defisit) sampai dengan periode tahun lalu					
c. Surplus (Defisit) tahun berjalan					
2. Terikat Permanen <sup>9</sup>					
3. Terikat Temporer <sup>10</sup>					
4. Hibah <sup>11</sup>					
5. Donasi					
6. Dst .....					
<b>Jumlah Ekuitas</b>					
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (II + III)</b>					

## 2. Laporan Operasional

### LAPORAN OPERASIONAL PERIODE .....<sup>12</sup>

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Tahun 2xx(n-1)	Tahun berjalan (20xx)			
		Anggaran (Rp)	Realisasi s.d Tgl ..... (Rp)	Prognosa (Rp)	Pencapaian (%)
1	2	3	4	5	6=(5-3)/(3)
<b>A. Pendapatan</b>					
1. Jasa layanan					
2. Hibah					
3. Hasil kerjasama					
4. Pendapatan dari APBD					
5. Pendapatan dari APBN					
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.					
<b>Jumlah Pendapatan (1+2+3+4+5+6)</b>					
<b>B. Biaya Operasional</b>					
1. Biaya pelayanan					
2. Biaya umum dan administrasi					
<b>Jumlah Biaya Operasional (1+2)</b>					
<b>Surplus (Defisit) setelah biaya operasional (A-B)</b>					

<sup>9</sup> Diisi periode yang berakhir pada tanggal neraca.

<sup>10</sup> Diisi periode yang berakhir pada tanggal neraca.

<sup>11</sup> Diisi periode yang berakhir pada tanggal neraca.

<sup>12</sup> Diisi periode yang berakhir pada tanggal neraca.



Uraian	Tahun 2xx(n-1)	Tahun berjalan (20xx)			
		Anggaran (Rp)	Realisasi s.d Tgl ..... (Rp)	Prognosa (Rp)	Pencapaian (%)
1	2	3	4	5	6 = (5-3)/(3)
<b>C. Pendapatan Non Operasional</b>					
<b>D. Biaya Non Operasional</b>					
<b>Surplus (Defisit) sebelum pos keuntungan/ Kerugian</b>					
<b>Surplus (Defisit) sebelum pos- pos luar biasa</b>					
1. Pendapatan dari kejadian luar biasa					
2. Biaya dari kejadian luar biasa					
<b>Surplus (Defisit) tahun berjalan bersih</b>					

### 3. Laporan Arus Kas

#### a. LAPORAN ARUS KAS PERIODE.....<sup>13</sup> Metode langsung

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Tahun 2xx(n-1)	Tahun berjalan (20xx)			
		Anggaran (Rp)	Realisasi s.d tgl ... (Rp)	Prognosa (Rp)	Pencapaian (%)
1	2	3	4	5	6 = (5-3)/3
<b>A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional</b>					
<b>Arus Kas Masuk</b>					
1. Jasa layanan					
2. Hibah					
3. Hasil kerjasama					
4. Pendapatan dari APBD					
5. Pendapatan dari APBN					
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.					
<b>Arus Kas Keluar</b>					
1. Biaya layanan					
2. Biaya umum dan administrasi					
3. Biaya lain-lain					
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</b>					
<b>B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>					
<b>Arus Kas Masuk</b>					
1. Hasil penjualan aset					
2. Hasil investasi					
3. Dst .....					
<b>Arus Kas Keluar</b>					
1. Perolehan aset					
2. Pembelian investasi					
3. Perolehan aset lainnya					
4. Dst .....					
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>					

<sup>13</sup> Diisi Periode yang berakhir pada tanggal neraca.

Uraian	Tahun 2xx(n-1)	Tahun berjalan (20xx)			
		Anggaran (Rp)	Realisasi s.d tgl ... (Rp)	Prognosa (Rp)	Pencapaian (%)
1	2	3	4	5	6 = (5-3)/3
<b>C. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>					
<b>Arus Kas Masuk</b>					
1. Penerimaan Pinjaman dari ....					
2. Dst....					
<b>Arus Kas Keluar</b>					
1. Pembayaran pinjaman kepada .....					
2. Dst .....					
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>					
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih</b>					
<b>Kas dan Setara Kas Awal</b>					
<b>Kas dan Setara Kas Akhir</b>					

**b. LAPORAN ARUS KAS  
PERIODE.....<sup>14</sup>  
Metode Tidak langsung**

*(dalam ribuan rupiah)*

Uraian	Tahun 2xx(n-1)	Tahun Berjalan (20xx)			
		Anggaran (Rp)	Realisasi s.d tgl ..... (Rp)	Prognosa (Rp)	Pencapaian (%)
1	2	3	4	5	6=(5-3)/3
<b>A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional</b>					
1. Surplus (Defisit) tahun berjalan					
2. Penyesuaian ke dasar kas					
a. Biaya penyusutan dan amortisasi					
b. Kerugian penurunan nilai					
c. Pembayaran bunga					
d. Dst.....					
3. Perubahan aset lancar					
a. Investasi jangka pendek					
b. Piutang usaha					
c. Piutang lain-lain					
d. Persediaan					
e. Uang muka					
f. Pendapatan yang masih harus diterima					
4. Perubahan kewajiban jangka pendek					
a. Utang usaha					
b. Utang pajak					
c. Biaya yang masih harus dibayar					
d. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun					

<sup>14</sup> Diisi Periode yang berakhir pada tanggal neraca.

Uraian	Tahun 2xx(n-1)	Tahun Berjalan (20xx)			
		Anggaran (Rp)	Realisasi s.d tgl ..... (Rp)	Prognosa (Rp)	Pencapaian (%)
1	2	3	4	5	6=(5-3)/3
e. Pendapatan yang diterima di muka					
f. Utang jangka pendek lainnya					
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</b>					
<b>B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>					
<b>Arus Kas Masuk</b>					
1. Hasil penjualan aset					
2. Hasil investasi					
3. Dst .....					
<b>Arus Kas Keluar</b>					
1. Perolehan aset					
2. Pembelian investasi					
3. Perolehan aset lainnya					
4. Dst .....					
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>					
<b>C. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>					
<b>Arus Kas Masuk</b>					
1. Penerimaan Pinjaman dari .....					
2. Dst....					
<b>Arus Kas Keluar</b>					
1. Pembayaran pinjaman kepada .....					
2. Dst .....					
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>					
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih</b>					
<b>Kas dan Setara Kas Awal</b>					
<b>Kas dan Setara Kas Akhir</b>					

#### 4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

##### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tanggal ..... Dan Periode.....<sup>15</sup>

**a. Umum**

.....  
.....

**b. Kebijakan Akuntansi** (*mengikuti pedoman akuntansi yang berlaku*)

.....  
.....

**c. Penjelasan pos-pos laporan keuangan**

*Sebagai contoh untuk pos kas dan setara kas, dan piutang usaha.*

<sup>15</sup> Diisi tanggal Neraca dan Periode yang berakhir pada tanggal neraca.

**1) Kas dan setara kas, terdiri dari :**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran Tahun Berjalan</b>	<b>Realisasi s.d .....</b>	<b>Prognosa s.d 31 Desember...</b>	<b>Selisih (%)</b>
1	2	3	4	5=(4-2)/2
Kas di bendahara penerimaan				
Giro Bank .....				
Tabungan Bank ...				
Deposito Bank .....				
Jumlah				

**2) Piutang usaha, terdiri dari :**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran Tahun Berjalan</b>	<b>Realisasi s.d .....</b>	<b>Prognosa s.d 31 Desember...</b>	<b>Selisih (%)</b>
1	2	3	4	5=(4-2)/2
Piutang kepada .....				
Piutang kepada .....				
Jumlah				

**d. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

.....  
.....

**BAB III**  
**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN.....<sup>16</sup>**

**A. Kondisi Lingkungan yang Diprediksi Akan Mempengaruhi Pencapaian Kinerja**

**1. Faktor Internal**

**a. Kondisi Pelayanan**

1) Kekuatan:

- .....
- .....
- .....

2) Kelemahan:

- .....
- .....
- .....

**b. Kondisi Keuangan**

1) Kekuatan:

- .....
- .....
- .....

2) Kelemahan:

- .....
- .....
- .....

**c. Kondisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia**

1) Kekuatan:

- .....
- .....
- .....

2) Kelemahan:

- .....
- .....
- .....

**d. Kondisi Sarana dan Prasarana**

1) Kekuatan:

- .....
- .....
- .....

2) Kelemahan:

- .....
- .....

**2. Faktor Eksternal**

a. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait

.....  
.....

b. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi *Public Service Obligation (PSO)*.

.....  
.....

---

<sup>16</sup> Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan

- c. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang SDM  
.....  
.....
- d. Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat  
.....  
.....
- e. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi  
.....  
.....
- f. Keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis  
.....  
.....
- g. Keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional  
.....  
.....

**B. Asumsi yang digunakan**

**1. Aspek Makro**

No	Indikator Ekonomi	Asumsi TA..... <sup>17</sup>
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	
2.	Tingkat inflasi (%)	
3.	Pertumbuhan pasar (%)	
4.	Tingkat suku bunga pinjaman (%)	
5.	Kurs (Rp)	
6.	Dst .....	

*Catatan:*  
uraian di atas diisi sesuai dengan kondisi BLUD dan indikator ekonomi Daerah setempat

**2. Aspek Mikro**

No	Uraian	Asumsi TA..... <sup>18</sup>
1.	Pembiayaan dari pemerintah daerah sebagai fungsi <i>Public Service Obligation (PSO)</i>	
2.	Rencana rata-rata kenaikan tarif	
3.	Rencana pengembangan pelayanan	
4.	Rencana peningkatan pelayanan	
5.	Dst .....	

Dijelaskan implikasi masing-masing asumsi terhadap rencana kinerja, dapat berupa persentase, satuan, pertumbuhan, kenaikan/penurunan.  
.....  
.....

**C. Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Kegiatan**

**1. Pelayanan**

No	Jenis Pelayanan <sup>19</sup>	Sasaran <sup>20</sup>	Indikator <sup>21</sup>	Target	Kegiatan
1	.....				
2	.....				
3	.....				
4	.....				

<sup>17</sup> Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan.  
<sup>18</sup> Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan.  
<sup>19</sup> Diisi jenis Pelayanan yang ada dalam BLUD,  
<sup>20</sup> Diisi Sasaran dari jenis layanan yang ada pada BLUD  
<sup>21</sup> Diisi indikator pada Standar Pelayanan Minimal.

*Ilustrasi/Contoh:*

*Kegiatan Pelayanan pada BLUD untuk Rumah Sakit Daerah .....*

No	Jenis Pelayanan	Sasaran	Indikator <sup>22</sup>	Target <sup>23</sup>	Kegiatan <sup>24</sup>
1	UGD	Terwujudnya perawat yang mempunyai kompetensi dalam penyelamatan jiwa	Tenaga UGD bersertifikat	100%	Pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) untuk 5 perawat yang belum memiliki sertifikat
2	Akuntansi (dahulu masuk dalam Kegiatan Pendukung Pelayanan. Namun, sejak ditetapkannya PP 74 Tahun 2012, menjadi Kegiatan Pelayanan)	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Laporan sesuai standar akuntansi	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Pelatihan, penyusunan SOP, penempatan pegawai sesuai kompetensi

#### D. Program Kerja dan Kegiatan

##### 1. Program Kerja:

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan .....

##### 2. Kegiatan Pelayanan, terdiri dari:

- 1) Pelayanan .....
- 2) Pelayanan .....
- 3) Dst.....

#### E. Perkiraan Pendapatan

No	Sumber Pendapatan	Prognosa Tahun 2xxx (TA Berjalan) (Rp)	Proyeksi Tahun 2xxx+1 (Rp)
1	2	3	4
1.	Jasa Layanan		
2.	Hibah		
3.	Kerjasama		
4.	APBD		
5.	APBN		
6.	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		
	<b>Jumlah</b>		

*Penjelasan:*

.....  
 .....  
 .....

<sup>22</sup> Diisi indikator pada Standar Pelayanan Minimal.

<sup>23</sup> Diisi target yang akan dicapai dalam Tahun Anggaran yang dianggarkan.

<sup>24</sup> Diisi kegiatan yang akan dilakukan pada tahun anggaran yang dianggarkan

Penerimaan Investasi

No	Jenis Investasi	Prognosa Tahun 2xxx (TA Berjalan) (Rp)	Proyeksi Tahun 2xxx+1 (Rp)
1	2	3	4
	<b>1. Pelepasan aset</b>		
	a. Kendaraan		
	b. Mesin		
	c. Dst.....		
	<b>2. Pencairan investasi</b>		
	a. Pencairan deposito		
	b. Penjualan surat berharga		
	c. Dst.....		
	<b>Jumlah</b>		

Penjelasan:

.....  
 .....  
 .....

Penerimaan Pendanaan

No	Jenis Pendanaan	Prognosa Tahun 2xxx (TA Berjalan) (Rp)	Proyeksi Tahun 2xxx+1 (Rp)
1	2	3	4
1.	Penarikan Pinjaman dari .....		
2.	Dst.....		
	<b>Jumlah</b>		

Penjelasan:

.....  
 .....  
 .....

**F. Perkiraan Biaya**

**1. Biaya Setiap Unit Pelayanan**

<b>Program</b>		: Peningkatan Kualitas Pelayanan .....		
<b>Kegiatan</b>		: Pelayanan .....		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja
<b>Input</b>				
<b>Output</b>	1. ....			
	2. ....			
<b>Outcome</b>	..... <sup>25</sup>			
Anggaran Biaya				
Komponen Biaya	Rincian Biaya			Jumlah Anggaran (Rp)
	Jumlah	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5 = (2X4)
<b>A. Biaya Pelayanan</b>				
1. Biaya pegawai				
.....				

<sup>25</sup> Dapat diisi dengan target terkait dengan Standar Pelayanan Minimal.



<b>Program</b> : Peningkatan Kualitas Pelayanan .....				
<b>Kegiatan</b> : Pelayanan .....				
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			
<b>Input</b>				
<b>Output</b>	1. .... 2. ....			
<b>Outcome</b>	..... <sup>25</sup>			
<b>Anggaran Biaya</b>				
Komponen Biaya	Rincian Biaya			Jumlah Anggaran
	Jumlah	Satuan	Harga satuan	(Rp)
1	2	3	4	5 = (2X4)
.....				
2. Biaya bahan <sup>26</sup>				
.....				
3. Biaya jasa pelayanan				
.....				
4. Biaya pemeliharaan				
.....				
5. Biaya barang dan jasa				
.....				
6. Biaya depresiasi				
.....				
7. Biaya pelayanan lainnya				
.....				
<b>B. Biaya Umum Dan Administrasi</b>				
1. Biaya pegawai				
.....				
2. Biaya administrasi kantor				
.....				
3. Biaya pemeliharaan				
.....				
4. Biaya barang dan jasa				
.....				
5. Biaya promosi				
.....				
6. Biaya depresiasi				
.....				
7. Biaya umum dan administrasi lainnya.				
.....				
.....				

<sup>26</sup> Termasuk harga pokok barang yang dijual.

<b>Program</b> : Peningkatan Kualitas Pelayanan .....				
<b>Kegiatan</b> : Pelayanan .....				
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>
<b>Input</b>				
<b>Output</b>	1. .... 2. ....			
<b>Outcome</b>	..... <sup>25</sup>			
<b>Anggaran Biaya</b>				
Komponen Biaya	Rincian Biaya			Jumlah Anggaran
	Jumlah	Satuan	Harga satuan	(Rp)
1	2	3	4	5 = (2X4)
<b>C. Biaya Non Operasional</b>				
1. Biaya bunga				
.....				
2. Biaya administrasi bank				
.....				
3. Kerugian pelepasan aset tetap				
.....				
4. Kerugian penurunan nilai				
.....				
5. Biaya non operasional lainnya				
.....				
<b>Jumlah Biaya (A+B+C)</b>				

Catatan : Format ini dibuat untuk setiap jenis pelayanan

## 2. Pengeluaran Investasi

<b>Program</b> : Peningkatan Kualitas Pelayanan .....				
<b>Kegiatan</b> : Pelayanan.....				
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>
<b>Input</b>				
<b>Output</b>	1. .... 2. ....			
<b>Outcome</b>	..... <sup>27</sup>			
<b>Pengeluaran Investasi</b>				
Komponen Pengeluaran Investasi	Rincian Pengeluaran			Jumlah Pengeluaran
	Jumlah	Satuan	Harga satuan	(Rp)
1	2	3	4	5 = (2X4)
1. Pembelian tanah				
.....				

<sup>27</sup> Dapat diisi dengan target terkait dengan Standar Pelayanan Minimal.

1	2	3	4	5 = (2X4)
.....				
2. Pembelian peralatan dan mesin				
.....				
.....				
3. Pembangunan gedung dan bangunan				
.....				
.....				
4. Pembelian kendaraan				
.....				
.....				
5. Pembelian Peralatan Kantor				
.....				
.....				
6. Pembangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
.....				
.....				
7. Pembelian surat berharga jangka panjang				
.....				
.....				
8. Pembangunan/ pengembangan Sistem Informasi				
.....				
.....				
9. Pembangunan/ pengembangan sarana fisik lainnya				
.....				
.....				
<b>Jumlah Pengeluaran Investasi</b>				

Catatan : Format ini dibuat untuk setiap jenis pelayanan

### 3. Pengeluaran Pendanaan

<b>Program</b>	: Peningkatan Kualitas Pelayanan .....			
<b>Kegiatan</b>	: Pelayanan .....			
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>		
<b>Input</b>				
<b>Output</b>	1. .... 2. ....			
<b>Outcome</b>	..... <sup>28</sup>			
<b>Pengeluaran Pendanaan</b>				
<b>Komponen Pendanaan</b>	<b>Rincian Pengeluaran</b>			<b>Jumlah Pengeluaran (Rp)</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga satuan</b>	

<sup>28</sup> Diisi sesuai target terkait dengan Standar Pelayanan Minimal.

1	2	3	4	5 = (2X4)
1. Pengeluaran pembayaran hutang				
a. Pokok.....				
b. bunga dan administrasi.....				
c. Komisi, provisi, denda .....				
2. Dst .....				
.....				
<b>Jumlah</b>				

### G. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

Anggaran BLUD merupakan penjabaran program dan kegiatan dalam satuan uang berdasarkan pendapatan, biaya, dan pengeluaran yang dananya bersumber dari seluruh pendapatan BLUD.

#### 1. Anggaran Pendapatan (Basis Akrual)

Berdasarkan sumber pendapatan:

- (a) Jasa layanan;
- (b) Hibah;
- (c) Hasil kerjasama;
- (d) APBD;
- (e) APBN; dan
- (f) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Penyajian anggaran pendapatan BLUD, dengan format sebagai berikut:

#### FORMAT ANGGARAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BERDASARKAN SUMBER PENDAPATAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Uraian	Prognosa TA 20xx (TA berjalan) (Rp)	Proyeksi TA 20xx+1 (Rp)	Perkiraan Maju (Forward Estimate) T A 20xx+2 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5	6=(4-3)/3
<b>1.</b>	Pendapatan jasa layanan				
	a. ....				
	b. ....				
	c. Dst .....				
<b>2.</b>	Hibah				
	a. ....				
	b. ....				
<b>3.</b>	Hasil kerjasama				
	a. Hasil kerjasama dengan .....				
	b. Hasil kerjasama dengan .....				
	c. Dst ..... <sup>29</sup>				
<b>4.</b>	Pendapatan dari APBD				
	a. Operasional				
	b. Investasi				
	c. Dst .....				
<b>5.</b>	Pendapatan dari APBN				

<sup>29</sup> dimungkinkan ada lampiran tersendiri

	a. Operasional				
	b. Investasi				
	c. Dst .....				
<b>6.</b>	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
	a. keuntungan penjualan aset.				
	b. hasil pemanfaatan kekayaan.				
	c. jasa giro/bunga.				
	d. dividen.				
	e. Dst .....				
	<b>Jumlah</b>				

## 2. Anggaran Biaya (Basis AkruaI)

### a. Biaya Operasional BLUD, meliputi:

- 1) Biaya pelayanan, terdiri dari:
  - (a) biaya pegawai;
  - (b) biaya bahan;
  - (c) biaya jasa pelayanan;
  - (d) biaya pemeliharaan;
  - (e) biaya barang dan jasa;
  - (f) biaya depresiasi; dan
  - (g) biaya pelayanan lain-lain.
- 2) Biaya umum dan administrasi, terdiri dari:
  - (a) biaya pegawai;
  - (b) biaya administrasi kantor;
  - (c) biaya pemeliharaan;
  - (d) biaya barang dan jasa;
  - (e) biaya promosi;
  - (f) biaya depresiasi; dan
  - (g) biaya umum dan administrasi lainnya.

### b. Biaya Non Operasional, meliputi:

- 1) biaya bunga;
- 2) biaya administrasi bank;
- 3) kerugian pelepasan aset;
- 4) kerugian penurunan nilai; dan
- 5) biaya non operasional lainnya.

Penyajian anggaran biaya BLUD dilakukan dengan format sebagai berikut:

**Format Anggaran Biaya Badan Layanan Umum Daerah .....  
Tahun Anggaran .....<sup>30</sup>**

No	Alokasi Biaya	Sumber Dana Tahun Anggaran.....							Jumlah
		Jasa layanan	Hibah	Kerjasama	APBD	APBN	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	Penggunaan Sisa Kas (Surplus)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>BIAYA OPERASIONAL</b>								
<b>A.</b>	<b>Biaya Pelayanan</b>								
1.	Biaya pegawai ..... .....								
2.	Biaya bahan . .... . ....								
3.	Biaya jasa pelayanan . .... . ....								
4.	Biaya pemeliharaan . .... . ....								
5.	Biaya barang dan jasa . .... . ....								
6.	Biaya depresiasi								

<sup>30</sup> Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan.







### 3. Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (Basis Kas)

a. Pendapatan Operasional:

- 1) Pendapatan yang diterima dari:
  - Umum
  - Asuransi/penjaminan
  - Pemerintah daerah
  - Pemerintah
  - Dst.....
- 2) Pendapatan hasil kerjasama
  - Kerjasama dengan .....
  - Kerjasama dengan.....
  - Dst.....
- 3) Pendapatan hibah
  - Hibah dari .....
  - Hibah dari .....
  - Dst .....
- 4) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah
  - Bunga dari .....
  - Sewa dari .....
  - Dst .....

b. Penerimaan investasi

- 1) Pelepasan aset, antara lain:
  - Kendaraan
  - Mesin
  - Dst...
- 2) Pencairan investasi, antara lain:
  - Pencairan deposito
  - Penjualan surat berharga
  - Dst .....

c. Penerimaan Pendanaan, meliputi:

- 1) Penarikan pinjaman dari .....
- 2) Dst.....

**Format Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (Basis Kas)  
Tahun Anggaran .....<sup>31</sup>**

No	Uraian	Prognosa ..... <sup>32</sup> (Rp)	Proyeksi Tahun Anggaran ..... <sup>33</sup> (Rp)	Perkiraan Maju ( <i>Forward Estimate</i> ) Tahun Anggaran .... <sup>34</sup> (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>				
<b>1.</b>	<b>Pendapatan jasa layanan</b>				
	a. Umum				
	b. Asuransi/penjaminan				
	c. Pemerintah daerah				
	d. Pemerintah				
	e. Dst .....				
<b>2.</b>	<b>Pendapatan hasil kerjasama</b>				
	a. Kerjasama dengan ...				
	b. Kerjasama dengan ...				
	c. Dst .....				
<b>3.</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>				
	a. Hibah dari .....				
	b. Hibah dari .....				
	c. Dst.....				
<b>4.</b>	<b>Lain-lain pendapatan BLUD yang sah</b>				
	a. Bunga dari .....				
	b. Sewa dari .....				
	c. Dst .....				
<b>II</b>	<b>PENERIMAAN INVESTASI</b>				
<b>1.</b>	<b>Pelepasan aset</b>				
	a. Kendaraan				
	b. Mesin				
	c. Dst.....				
<b>2.</b>	<b>Pencairan investasi</b>				
	a. Pencairan deposito				
	b. Penjualan surat berharga				
	c. Dst .....				
<b>III</b>	<b>PENERIMAAN PENDANAAN</b>				
	1. Penarikan pinjaman dari...				
	2. Dst .....				
	<b>Jumlah</b>				

<sup>31</sup> Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan.

<sup>32</sup> Diisi tahun anggaran berjalan (20xx)

<sup>33</sup> Diisi tahun yang dianggarkan (20xx+1)

<sup>34</sup> Diisi satu tahun setelah tahun yang dianggarkan (20xx+2)

#### **4. Anggaran Belanja (Basis Kas)**

##### **a. Belanja operasional, meliputi:**

- 1) pembayaran kepada pegawai;
- 2) pembayaran kepada pihak ketiga;
- 3) pembayaran lainnya.

##### **b. Belanja investasi (Belanja Modal), meliputi:**

- 1) Perolehan tanah;
- 2) Perolehan peralatan dan mesin;
- 3) Perolehan gedung dan bangunan;
- 4) Perolehan kendaraan;
- 5) Perolehan perlengkapan dan peralatan kantor;
- 6) Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan;
- 7) Pengeluaran Pembelian surat berharga jangka panjang;
- 8) Pengeluaran Pembangunan/pengembangan sistem informasi; dan
- 9) Pengeluaran Pembangunan/pengembangan sarana fisik lainnya.

##### **c. Pengeluaran untuk Pendanaan, meliputi:**

- 1) pembayaran pinjaman;
- 2) Dst.....

**Format Anggaran Belanja Badan Layanan Umum Daerah (Basis Kas)  
Tahun Anggaran .....<sup>36</sup>**

No	Alokasi Biaya	Sumber Dana Tahun Anggaran.....						Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	Penggunaan Sisa Kas (Surplus)	Jumlah
		Jasa layanan	Hibah	Kerjasama	APBD	APBN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
<b>I</b>	<b>BELANJA OPERASIONAL</b>									
1.	Pembayaran kepada pegawai . . . . . . . . . .									
2.	Pembayaran kepada pihak ketiga . . . . . . . . . .									
3.	Pembayaran lain-lain . . . . . . . . . .									
<b>II</b>	<b>PENGELUARAN INVESTASI</b>									
1.	Perolehan tanah . . . . . . . . . .									
2.	Perolehan peralatan dan mesin . . . . . . . . . .									
3.	Perolehan gedung dan bangunan . . . . . . . . . .									
4.	Perolehan kendaraan									

<sup>36</sup> Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan.

No	Alokasi Biaya	Sumber Dana Tahun Anggaran.....						Penggunaan Sisa Kas (Surplus)	Jumlah
		Jasa layanan	Hibah	Kerjasama	APBD	APBN	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	. .....								
	. .....								
5.	Perolehan perlengkapan dan peralatan kantor								
	. .....								
	. .....								
6.	Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan								
	. .....								
	. .....								
7.	Pengeluaran pembelian surat berharga								
	. .....								
	. .....								
8.	Pengeluaran Pembangunan/Pengembangan sistem informasi								
	. .....								
	. .....								
9.	Pengeluaran Pembangunan/Pengembangan sarana fisik lainnya								
	. .....								
	. .....								
<b>III</b>	<b>PENGELUARAN PENDANAAN</b>								
1.	Pembayaran Pinjaman								
	a. Pokok.....								
	b. Bunga dan administrasi.....								
	c. Provisi, denda.....								
2.	Dst.....								
	<b>Jumlah</b>								

**Format Anggaran Biaya Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Jenis Belanja**

No	Jenis Biaya	Jenis Belanja			Total Biaya
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>BIAYA OPERASIONAL</b>				
<b>A.</b>	<b>Biaya Pelayanan</b>				
1.	Biaya pegawai .....				
2.	Biaya bahan .....				
3.	Biaya jasa pelayanan .....				
4.	Biaya pemeliharaan .....				
5.	Biaya barang dan jasa .....				
6.	Biaya depresiasi .....				
7.	Biaya pelayanan lainnya .....				
<b>B.</b>	<b>Biaya Umum dan Administrasi</b>				
1.	Biaya pegawai .....				
2.	Biaya administrasi kantor .....				
3.	Biaya pemeliharaan .....				
4.	Biaya barang dan jasa. .....				
5.	Biaya promosi .....				
6.	Biaya depresiasi .....				
7.	Biaya umum dan administrasi lainnya .....				

No	Jenis Biaya	Jenis Belanja			Total Biaya
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6
<b>II.</b>	<b>BIAYA NON OPERASIONAL</b>				
1.	Biaya bunga ..... .....				
2.	Biaya administrasi bank ..... .....				
3.	Kerugian penjualan aset tetap ..... .....				
4.	Kerugian penurunan nilai ..... .....				
5.	Biaya non operasional lainnya ..... .....				
	<b>JUMLAH</b>				

**Format Anggaran Pengeluaran Investasi Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Jenis Belanja dan Jenis Pembiayaan**

No	Jenis Pengeluaran	JENIS BELANJA			JENIS PEMBIAYAAN		Total Biaya
		Belanja pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Perolehan tanah ..... .....						
2.	Perolehan peralatan dan mesin ..... .....						
3.	Perolehan gedung dan bangunan ..... .....						
4.	Perolehan kendaraan ..... .....						
5.	Perolehan perlengkapan dan peralatan kantor ..... .....						
6.	Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan ..... .....						

No	Jenis Pengeluaran	JENIS BELANJA			JENIS PEMBIAYAAN		Total Biaya
		Belanja pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Pengeluaran Pembelian surat berharga jangka panjang						
	.....						
	.....						
8.	Pengeluaran Pembangunan/ pengembangan sistem informasi						
	.....						
	.....						
9.	Pengeluaran Pembangunan/ pengembangan sarana fisik lainnya						
	.....						
	.....						
	<b>JUMLAH</b>						

**Format Anggaran Pengeluaran Pendanaan  
Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan  
Jenis Belanja dan Jenis Pembiayaan**

No	Jenis Pengeluaran	JENIS ANGGARAN			JENIS PEMBIAYAAN		Total Biaya
		Belanja pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pembayaran Pinjaman						
a.	Pokok.....						
b.	Bunga dan administrasi.....						
c.	Komisi, provisi, denda.....						
2.	Dst.....						
	<b>JUMLAH</b>						

**G. Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran**

Besaran ambang batas dalam RBA ini adalah .....% dari biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan.



## **BAB IV**

# **PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN**

### **TAHUN ANGGARAN .....<sup>36</sup>**

#### **Langkah-langkah dalam menyusun proyeksi laporan keuangan BLUD:**

1. Dapatkan prognosa laporan keuangan Tahun Anggaran Berjalan sebagaimana tersaji pada Bab II, terdiri dari prognosa:
  - a. Neraca;
  - b. Laporan Operasional;
  - c. Laporan Arus Kas; dan
  - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
  
2. Dapatkan kebijakan atau target-target, antara lain :
  - a. Piutang akhir tahun yang dianggarkan;
  - b. Persediaan akhir tahun yang dianggarkan; dan
  - c. Hutang akhir tahun yang dianggarkan.
  
3. Dapatkan dan analisis rencana kegiatan (usaha) pada tahun yang dianggarkan, berupa aktivitas-aktivitas (data dari BAB III) :
  - a. Aktivitas Operasional, terdiri dari:
    - 1) Aktivitas yang berpengaruh pada akun pendapatan (akrual);
    - 2) Aktivitas yang berpengaruh pada akun biaya (akrual);
    - 3) Aktivitas yang berpengaruh pada kewajiba jangka pendek; dan
    - 4) Aktivitas lainnya yang berpengaruh pada aset lancar.
  
  - b. Aktivitas Investasi, terdiri dari:
    - 1) Pembelian/ Belanja Aset Tidak Lancar;
    - 2) Penerimaan hasil investasi; dan
    - 3) Penjualan/Penghentian Investasi.
  
  - c. Aktivitas Pendanaan  
Aktivitas yang berpengaruh pada keputusan keuangan (sumber dana eksternal), seperti penerimaan dan pembayaran utang.
  
4. Siapkan proyeksi jurnal transaksi tahun yang dianggarkan, untuk mencatat proyeksi aktivitas operasional, investasi dan pendanaan sebagaimana direncanakan pada butir 2 dan 3.
  
5. Siapkan *Worksheet* (Kertas Kerja) Laporan Keuangan yang diproyeksikan, baik kertas kerja Laporan Operasional maupun kertas kerja Neraca.
  
6. Siapkan proyeksi jurnal penyesuaian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan, antara lain :
  - a. Penyisihan piutang;
  - b. Pendapatan yang masih harus diterima;
  - c. Penurunan nilai persediaan;
  - d. Penyusutan dan amortisasi;
  - e. Penurunan nilai aset tetap;

---

<sup>36</sup> Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan

- f. Provisi/kewajiban estimasian;
  - g. Biaya yang masih harus dibayar; dan
  - h. Reklasifikasi akun (misalnya utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun).
7. Menyajikan Laporan Keuangan yang diproyeksikan komparatif dengan Laporan Keuangan prognosa, dengan urutan penyelesaian:
- a. Proyeksi Neraca :
    - 1) Diperoleh dari kertas kerja kolom neraca;
    - 2) Sajikan sesuai format neraca.
  - b. Proyeksi Laporan Operasional:
    - 1) Diperoleh dari kertas kerja kolom Laporan Operasional;
    - 2) Kolom kredit merupakan pos-pos pendapatan dan keuntungan;
    - 3) Kolom debit merupakan pos-pos biaya dan kerugian;
    - 4) Sajikan sesuai format laporan operasional.
  - c. Laporan Arus Kas :
    - 1) Menggunakan metode tidak langsung; atau
    - 2) Menggunakan metode langsung.
  - d. Catatan atas Proyeksi Laporan Keuangan :
    - 1) Cukup menjelaskan pos-pos proyeksi laporan keuangan; ditambah
    - 2) Rincian pos-pos (optional).

**A. Neraca**

**PROYEKSI NERACA  
PER 31 DESEMBER .....<sup>37</sup>**

( dalam ribuan rupiah)

Uraian	Prognosa per 31 Desember TA 20xx (Rp)	Proyeksi per 31 DesemberTA (20xx + 1) (Rp)	Perubahan	
			JML (Rp)	%
1	2	3	4	5
<b>I. ASET</b>				
<b>A. Aset Lancar</b>				
1. Kas dan setara kas				
2. Investasi jangka pendek				
3. Piutang usaha				
4. Piutang lain-lain				
5. Persediaan				
6. Uang muka				
7. Pendapatan yang masih harus diterima				
8. Dst .....				
<b>Jumlah Aset Lancar.</b>				
<b>B. Investasi Jangka Panjang</b>				
<b>C. Aset Tetap</b>				
1. Tanah				
2. Peralatan dan mesin				
3. Gedung dan bangunan				
4. Kendaraan				
5. Perlengkapan dan peralatan kantor				
6. Jalan, irigasi, dan jaringan				
7. Dst .....				
<b>Jumlah Aset Tetap</b>				
<b>Akumulasi penyusutan</b>				
<b>Nilai buku aset tetap</b>				
<b>D. Aset Lain-lain.</b>				
1. Aset tak berwujud				
2. Konstruksi dalam pengerjaan				
3. Dst.....				
<b>Jumlah Aset Lain-lain</b>				
<b>Jumlah Aset (A+B+C+D)</b>				
<b>II. KEWAJIBAN</b>				
<b>A. Kewajiban Jangka Pendek</b>				
1. Utang usaha				
2. Utang pajak				
3. Biaya yang masih harus dibayar.				
4. Utang jangka panjang				
5. Pendapatan yang diterima di muka				
6. Dst.....				
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>				

<sup>37</sup> Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan

Uraian	Prognosa per 31 Desember TA 20xx (Rp)	Proyeksi per 31 DesemberTA (20xx + 1) (Rp)	Perubahan	
			JML (Rp)	%
1	2	3	4	5
<b>B. Kewajiban Jangka Panjang.</b>				
1. Utang jangka panjang				
2. Dst.....				
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang.</b>				
<b>Jumlah Kewajiban (A+B)</b>				
<b>III. EKUITAS</b>				
1. Ekuitas tidak terikat				
a. Ekuitas Awal				
b. Surplus (Defisit) s.d periode tahun lalu				
c. Surplus (Defisit) tahun berjalan				
2. Terikat Permanen <sup>38</sup>				
3. Terikat Temporer <sup>39</sup>				
4. Hibah <sup>40</sup>				
5. Donasi				
6. Dst .....				
<b>Jumlah Ekuitas</b>				
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (II + III)</b>				

<sup>38</sup> Seperti: APBD yang untuk Investasi.

<sup>39</sup> Seperti: APBD utk Gaji, operasional.

<sup>40</sup> Hibah merupakan pemberian yang berasal dari pemerintah/ pemerintah daerah lain.

**B. Laporan Operasional**

**PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL  
TAHUN ANGGARAN .....<sup>41</sup>**

*( dalam ribuan rupiah)*

Komponen	Prognosa TA 20xx (Rp)	Proyeksi TA (20xx + 1) (Rp)	Perubahan	
			JML (Rp)	%
1	2	3	4	5
<b>A. Pendapatan</b>				
1. Jasa layanan				
2. Hibah				
3. Hasil Kerjasama				
4. Pendapatan dari APBD				
5. Pendapatan dari APBN				
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
<b>Jumlah Pendapatan (1+2+3+4+5+6)</b>				
<b>B. Biaya Operasional</b>				
1. Biaya pelayanan				
2. Biaya umum dan administrasi				
<b>Jumlah Biaya Operasional (1+2)</b>				
<b>Surplus (Defisit) Setelah Biaya Operasional (A-B)</b>				
<b>C. Pendapatan Non Operasional</b>				
<b>D. Biaya Non Operasional</b>				
<b>Surplus (Defisit) sebelum pos Keuntungan/Kerugian</b>				
<b>Surplus /(Defisit) Sebelum Pos-Pos Luar Biasa</b>				
1. Pendapatan dari kejadian luar biasa				
2. Biaya dari kejadian luar biasa				
<b>Surplus (Defisit) Tahun Berjalan Bersih</b>				

<sup>41</sup> Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan.

**C. Laporan Arus Kas**

**PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS  
TAHUN.....<sup>42</sup>  
(Metode langsung)**

*(dalam ribuan rupiah)*

Komponen	Prognosa TA 20xx (Rp)	Proyeksi TA 20xx + 1 (Rp)	Perubahan	
			JML (Rp)	%
1	2	3	4	5
<b>A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional</b>				
<b>Arus Kas Masuk</b>				
1. Jasa layanan				
2. Hibah				
3. Hasil Kerjasama				
4. Pendapatan dari APBD				
5. Pendapatan dari APBN				
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
<b>Arus Kas Keluar</b>				
1. Biaya layanan				
2. Biaya umum dan administrasi				
3. Biaya lain-lain				
<b>Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasional</b>				
<b>B. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>				
<b>Arus Kas Masuk</b>				
1. Hasil penjualan aset tidak lancar <sup>43</sup>				
2. Hasil investasi				
3. Dst .....				
<b>Arus Kas Keluar</b>				
1. Perolehan aset tetap				
2. Pembelian investasi				
3. Dst .....				
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>				
<b>C. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>				
<b>Arus Kas Masuk</b>				
1. Penerimaan Pinjaman				
2. Dst .....				
<b>Arus Kas Keluar</b>				
1. Pembayaran pinjaman				
2. Dst.....				
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>				
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Kas dan Setara Kas Awal</b>				
<b>Kas dan Setara Kas Akhir</b>				

<sup>42</sup> Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan.

<sup>43</sup> Termasuk di dalamnya investasi jangka panjang (surat utang atau surat ekuitas/saham)

**PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS  
TAHUN.....<sup>44</sup>  
(Metode tidak langsung)**

*(dalam ribuan rupiah)*

Komponen	Prognosa TA 20XX (Rp)	Proyeksi TA 20XX + 1 (Rp)	Perubahan	
			Rp	%
1	2	3	4	5
<b>A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional</b>				
1. Surplus (Defisit) tahun berjalan				
2. Penyesuaian ke dasar kas				
a. Biaya penyusutan dan amortisasi				
b. Kerugian penurunan nilai				
c. Pembayaran bunga				
d. Dst.....				
3. Perubahan aset lancar				
a. Investasi jangka pendek				
b. Piutang usaha				
c. Piutang lain-lain				
d. Persediaan				
e. Uang muka				
f. Pendapatan yang masih harus diterima				
4. Perubahan kewajiban jangka pendek				
a. Utang Usaha				
b. Utang Pajak				
c. Biaya yang masih harus dibayar.				
d. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun.				
e. Pendapatan yang diterima di muka				
f. Utang jangka pendek lainnya				
<b>Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasional</b>				
<b>B. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>				
<b>Arus Kas Masuk</b>				
1. Hasil penjualan aset tidak lancar <sup>45</sup>				
2. Hasil investasi				
3. Dst.....				
<b>Arus Kas Keluar</b>				
1. Perolehan aset tetap				
2. Pembelian investasi				
3. Perolehan aset lainnya				
4. Dst .....				
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>				
<b>C. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>				
<b>Arus Kas Masuk</b>				
1. Penerimaan pinjaman				
2. Dst .....				
<b>Arus Kas Keluar</b>				
1. Pembayaran pinjaman				
2. Dst .....				
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>				
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih</b>				
<b>Kas dan Setara Kas Awal</b>				
<b>Kas dan Setara Kas Akhir</b>				

<sup>44</sup> Diisi Tahun Anggaran yang dianggarkan

<sup>45</sup> Termasuk di dalamnya investasi jangka panjang (surat utang atau surat ekuitas/saham)

**D. Catatan atas Proyeksi Laporan Keuangan.**

**CATATAN ATAS PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN  
PERIODE.....<sup>46</sup>**

Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, memuat informasi lebih lanjut tentang:

**a. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Keuangan**

Menjelaskan pos-pos laporan keuangan termasuk rincian dan pengungkapan yang memadai (*disclosure*). Sebagai contoh untuk pos kas dan setara kas, dan piutang usaha.

**1) Kas dan setara kas, terdiri dari:**

Uraian	Prognosa per 31 Desember TA 20XX (Rp)	Proyeksi TA 20XX + 1 (Rp)
1	2	3
Kas di bendahara penerimaan		
Kas di bendahara pengeluaran		
Giro Bank .....		
Giro Bank .....		
Tabungan Bank .....		
Tabungan Bank .....		
Deposito Bank .....		
Deposito Bank .....		
JUMLAH		

**2) Piutang usaha, terdiri dari:**

Uraian	Prognosa per 31 Desember TA 20XX (Rp)	Proyeksi TA 20XX + 1 (Rp)
1	2	3
Piutang kepada .....		
Piutang kepada .....		
Piutang kepada .....		
JUMLAH		

**b. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

.....  
.....

---

<sup>46</sup> Diisi Periode yang berakhir pada tanggal neraca.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah**

.....  
.....  
.....

### **B. Kesimpulan**

.....  
.....  
.....

....., .....20XX

BLUD .....  
Pemimpin BLUD

(.....)

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBENUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG  
SISTEM DAN PROSEDUR  
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Sejalan dengan implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja pada SKPD paska ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) merupakan salah satu dokumen yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan dalam implementasi penerapan PPK-BLUD. Sesuai Pasal 71 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tersebut, BLUD wajib menyusun RBA yang berdasarkan Rencana Strategis Bisnis yang telah ditetapkan.

RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran BLUD. Penyusunan RBA berprinsip pada anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Selain itu, RBA juga merupakan penjabaran dari rencana kerja dan anggaran untuk perangkat daerah yang telah menerapkan PPK-BLUD. Untuk itu, secara umum, proses penyusunan dan pengesahan RBA sama dengan proses penyusunan RKA-SKPD dalam konteks anggaran daerah. Bagi BLUD-SKPD, RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, sedangkan untuk BLUD-Unit Kerja, RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA-SKPD. Untuk BLUD-SKPD, RBA yang

telah disusun, disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Sedangkan BLUD-Unit Kerja, RBA disampaikan kepada kepala SKPD untuk dikonsolidasikan ke RKA-SKPD dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD. RBA atau RKA-SKPD beserta RBA tersebut oleh PPKD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan penelaahan, kemudian disampaikan kepada PPKD agar dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Mengingat pentingnya peranan RBA dalam implementasi PPK-BLUD, maka dirasa perlu adanya panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri bagi aparatur pemerintah daerah dalam menyusun dokumen RBA BLUD.

## **2. Tujuan**

Tersedianya panduan sebagai referensi bagi aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan RBA serta tata cara integrasi/konsolidasi RBA dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD atau dengan RKA-SKPD.

## **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam panduan ini, meliputi:

- a. Penyusunan RBA, terdiri dari: (1) dasar penyusunan RBA; (2) substansi RBA; (3) sistematika RBA; dan (4) format RBA;
- b. Mekanisme Pengajuan, Penetapan dan Pemberlakuan RBA; dan
- c. Integrasi/Konsolidasi RBA dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD atau dengan RKA-SKPD.

## **BAB II PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN**

### **1. Dasar Penyusunan**

RBA disusun berdasarkan Rencana Strategis Bisnis (Renstra Bisnis) yang telah ditetapkan dan sebagai upaya mewujudkan bisnis yang sehat dalam penerapan PPK-BLUD.

### **2. Substansi Rencana Bisnis dan Anggaran**

Substansi RBA, meliputi:

- a. kinerja tahun berjalan;
- b. asumsi makro dan mikro;
- c. sasaran, indikator, target kinerja dan kegiatan;
- d. perkiraan pendapatan, biaya, investasi, dan pendanaan;
- e. prosentase ambang batas;
- f. prognosa dan proyeksi laporan keuangan;
- g. perkiraan maju (*forward estimate*); dan
- h. ringkasan penerimaan dan pengeluaran.

### **3. Sistematika Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran**

Sistematika Dokumen RBA, sebagai berikut:

Halaman Sampul

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Gambaran Umum

B. Maksud dan Tujuan

C. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

**BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN BERJALAN**

A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

1. Faktor Internal

2. Faktor Eksternal

B. Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran dengan Fakta yang Terjadi.

1. Aspek Makro

2. Aspek Mikro

- C. Pencapaian Kinerja
  - 1. Non Keuangan
  - 2. Keuangan<sup>1</sup>
    - a. Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Layanan
    - b. Realisasi Biaya Berdasarkan Unit Layanan
    - c. Realisasi Biaya BLUD
    - d. Pencapaian Investasi
    - e. Pencapaian Pendanaan
- D. Prognosa Laporan Keuangan
  - 1. Neraca
  - 2. Laporan Operasional
  - 3. Laporan Arus Kas
  - 4. Catatan atas Laporan Keuangan

### BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN YANG DIANGGARKAN

- A. Kondisi Lingkungan yang Diprediksi akan Mempengaruhi Pencapaian Kinerja
  - 1. Faktor Internal
  - 2. Faktor Eksternal
- B. Asumsi yang Digunakan
  - 1. Aspek Makro
  - 2. Aspek Mikro
- C. Sasaran, Indikator, Target Kinerja, dan Kegiatan Pelayanan
- D. Program Kerja dan Kegiatan
  - 1. Program Kerja
  - 2. Kegiatan Pelayanan
- E. Perkiraan Total Pendapatan Kegiatan Pelayanan
- F. Perkiraan Total Biaya Kegiatan Pelayanan
- G. Perkiraan Total Penerimaan dan Pengeluaran Investasi untuk Kegiatan Pelayanan
- I. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah
  - 1. Anggaran Pendapatan
  - 2. Anggaran Biaya
  - 3. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Investasi
  - 4. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan

---

<sup>1</sup> Menyangkut masalah realisasi anggaran BLUD.

J. Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran

**BAB IV PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN TAHUN YANG DIANGGARKAN**

A. Neraca

B. Laporan Operasional

C. Laporan Arus Kas

D. Catatan atas Laporan Keuangan

**BAB V PENUTUP**

A. Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah

B. Kesimpulan

**LAMPIRAN**

**PENJELASAN:**

**a. Halaman Sampul**

Memuat:

- 1) Nama pemerintah daerah;
- 2) Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
- 3) Tahun yang dianggarkan.

**b. Kata Pengantar**

Memuat alasan pokok penyusunan RBA oleh pemimpin BLUD.

**c. Ringkasan Eksekutif**

Memuat pokok-pokok substansi RBA yang disusun.

**d. Daftar Isi**

Memuat urutan dan halaman dokumen RBA yang disusun.

**e. Bab I Pendahuluan**

Memuat:

1) **Gambaran Umum**

Berisi keterangan ringkas mengenai eksistensi dan kegiatan utama/pokok BLUD.

2) **Maksud dan Tujuan**

Memuat maksud dan tujuan BLUD.

3) **Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas**

Memuat susunan dan nama pejabat pengelola dan dewan pengawas (kalau ada).

**f. Bab II Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Tahun Berjalan**

Memuat:

1) **Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja**

Digambarkan mengenai hasil kegiatan tahun berjalan secara keseluruhan yang berisi penjelasan mengenai pencapaian target-target kinerja dan uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, meliputi:

(a) **Faktor Internal**

Menggambarkan kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, antara lain berkaitan dengan kondisi:

- pelayanan;
- keuangan;
- organisasi dan sumber daya manusia;
- sarana dan prasarana.

(b) **Faktor Eksternal**

Menggambarkan kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, antara lain berkaitan dengan:

- peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BLUD;
- kebijakan pemerintah/pemerintah daerah terhadap BLUD, menyangkut keuangan, sumber daya manusia, kelembagaan dan lain-lain;
- perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat;
- perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;
- keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis;
- keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional.

2) **Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran dengan Fakta yang Terjadi**, meliputi:

(a) Aspek Makro, dapat terdiri dari:

- pertumbuhan ekonomi;
- tingkat inflasi;
- pertumbuhan pasar;
- tingkat suku bunga pinjaman;
- kurs.

(b) Aspek Mikro, dapat terdiri dari:

- kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi *Public Service Obligation (PSO)*;

- perubahan tarif layanan;
- pengembangan/peningkatan pelayanan;
- asumsi yang berkaitan dengan analisis rasio keuangan.

### 3) **Pencapaian Kinerja**

Memuat pencapaian kinerja Non Keuangan dan Keuangan, dapat menggunakan pendekatan *Balanced Scorecards*, *Management By Objectives (MBO)*, *Result Oriented Management (ROM)*, *Result Based Management*, atau *Outcome Best Performance Management*.

Jika menggunakan pendekatan *Balanced Scorecards*, indikator kinerja terdiri dari:

- (a) Non Keuangan, terdiri dari pencapaian kinerja kegiatan pelayanan, antara lain berkaitan dengan perspektif:
  - pelanggan;
  - proses bisnis internal;
  - pertumbuhan dan pembelajaran.
- (b) Keuangan, memuat pencapaian semua aspek kinerja keuangan, dengan membandingkan antara realisasi dan anggaran, sekurang-kurangnya meliputi:
  - pendapatan;
  - biaya;
  - investasi;
  - pendanaan; dan
  - analisis keuangan lainnya, seperti:
    - likuiditas meliputi rasio lancar, rasio cepat, rasio kas;
    - solvabilitas meliputi rasio hutang terhadap ekuitas, rasio hutang terhadap aset;
    - aktivitas meliputi perputaran aset, perputaran piutang, perputaran persediaan;
    - rentabilitas meliputi pendapatan operasional dibagi biaya operasional (POBO), rasio proporsi pendapatan;
    - produktivitas (hasil produksi setiap unit pelayanan dibagi dengan sumber daya yang digunakan dalam rupiah);
    - efisiensi (output dibandingkan input).



#### 4) **Prognosa Laporan Keuangan<sup>2</sup>**

Memuat:

(a) Neraca

Disusun agar dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan BLUD sampai dengan 30 Juni, dan prognosa sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan.

(b) Laporan Operasional

Disusun untuk mengetahui realisasi sampai dengan 30 Juni dan prognosa sampai dengan 31 Desember atas jumlah pendapatan yang diakui dan biaya yang dibebankan pada akhir tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya.

(c) Laporan Arus Kas

Disusun untuk mengetahui arus kas dan setara kas sampai dengan 30 Juni dan prognosa sampai dengan 31 Desember dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan, kenaikan (penurunan) kas dan setara kas bersih, kas dan setara kas awal, dan jumlah saldo kas dan setara kas pada akhir tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya.

(d) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) memuat penjelasan pos-pos laporan keuangan, dan informasi lainnya yang relevan dengan laporan keuangan.

#### **g. Bab III Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun yang Dianggarkan**

Memuat:

1) **Kondisi Lingkungan yang Diprediksi akan Mempengaruhi Pencapaian Kinerja**

(a) **Faktor Internal**

Menggambarkan kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung diprediksi akan mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya sampai saat disusunnya RBA. Faktor internal, antara lain:

- pelayanan;
- keuangan;
- organisasi;

---

<sup>2</sup> *Pemakaian istilah-istilah dalam laporan keuangan disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.*

- sumber daya manusia;
- sarana dan prasarana.

(b) **Faktor Eksternal**

Menggambarkan kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung diprediksi akan mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya sampai saat disusunnya RBA. Faktor eksternal, antara lain:

- peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BLUD;
- kebijakan pemerintah/pemerintah daerah terhadap BLUD, menyangkut keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain;
- perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat;
- perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;
- keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis;
- keadaan perekonomian nasional maupun internasional.

2) **Asumsi yang digunakan**

Menggambarkan asumsi yang digunakan pada waktu menyusun RBA tahun yang dianggarkan, meliputi:

(a) Aspek Makro, dapat terdiri dari:

- pertumbuhan ekonomi;
- tingkat inflasi;
- pertumbuhan pasar;
- tingkat suku bunga pinjaman;
- kurs.

(b) Aspek Mikro, dapat terdiri dari:

- kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi *Public Service Obligation (PSO)*;
- proyeksi rata-rata kenaikan tarif layanan;
- pengembangan/peningkatan pelayanan.

3) **Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Kegiatan**

Sasaran, indikator, target kinerja, dan kegiatan pelayanan BLUD dalam meningkatkan mutu/kinerja layanan pada tahun yang dianggarkan.

4) **Program Kerja dan Kegiatan**

(a) Program Kerja:

Program kerja diisi 1(satu) Program yaitu "Program Peningkatan Kualitas Pelayanan ....." (*disesuaikan dengan tugas dan fungsi BLUD*).

(b) Kegiatan, diisi:

1(satu) kegiatan, yaitu kegiatan pelayanan, yang memuat semua produk layanan yang diberikan oleh BLUD.

5) **Perkiraan Pendapatan**

Merupakan total pendapatan kegiatan pelayanan yang dilakukan BLUD.

6) **Perkiraan Biaya**

Merupakan total biaya kegiatan pelayanan yang dilakukan BLUD.

7) **Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Investasi**

Merupakan total Penerimaan dan Pengeluaran investasi untuk Kegiatan pelayanan BLUD.

8) **Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan**

Merupakan total penerimaan dan pengeluaran pendanaan untuk Kegiatan pelayanan BLUD.

9) **Anggaran Badan Layanan Umum Daerah**

Anggaran BLUD merupakan penjabaran program dan kegiatan dalam bentuk satuan mata uang berupa pendapatan dan biaya, yang dananya bersumber dari seluruh pendapatan BLUD.

(a) Anggaran Pendapatan

Disusun berdasarkan sumber pendapatan yang berasal dari: jasa layanan; hibah; hasil kerjasama; APBD; APBN; dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

(b) Anggaran Biaya, disusun menurut:

- Sumber dan alokasi dana, meliputi anggaran biaya BLUD yang diperinci berdasarkan sumber dana yang diperoleh dan alokasi dana;
- Jenis anggaran, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

(c) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Investasi

Disusun menurut sumber dan alokasi dana.

(d) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan

Disusun menurut sumber dan alokasi dana.

10) **Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran**

(a) Anggaran BLUD yang tercantum dalam RBA dapat bertambah atau berkurang dari yang direncanakan sepanjang bertambah atau

berkurangnya terkait dengan pendapatan secara proporsional (*flexible budget*).

- (b) *Flexible budget* tersebut ditetapkan dengan besaran ambang batas, dihitung dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain kecenderungan (*trend*) naik/turun selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan realisasi dua tahun anggaran sebelumnya, serta selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan prognosa tahun anggaran berjalan.
- (c) Ambang batas ditetapkan dengan besaran prosentase dari pendapatan jasa layanan yang tercantum dalam RBA tahun anggaran yang dianggarkan. Hal tersebut dapat dilakukan apabila volume kegiatan pelayanan dan pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang dianggarkan.

Contoh penentuan ambang batas RBA Tahun Anggaran 20XX:

Dibuat pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk Tahun Anggaran 20XX:

Tabel

Anggaran Pendapatan dan Realisasi/Prognosa BLUD yang bersumber dari Jasa Layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, Tahun Anggaran (20XX-3), (20XX-2), dan (20XX-1)

(dalam juta)

No	Tahun	Anggaran <sup>3</sup>	Realisasi/ Prognosa	Selisih	
				Rp	%
1	2	3	4	5 =(4-3)	6 =(5/3X100)
1	(20XX-3)	5.000	7.000	2.000	40,00
2	(20XX-2)	9.000	11.000	3.000	33,33
3	(20XX-1)	11.000	15.000	4.000	36,36
<b>Jumlah</b>					<b>109,69</b>

Berdasarkan tabel, didapat besaran ambang batas RBA tahun anggaran 20XX =  $(109,69 : 3) = 36,56\%$  dari rencana biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, Tahun Anggaran 20XX.

<sup>3</sup> Anggaran pendapatan yang berasal dari jasa layanan.

Untuk itu, apabila rencana biaya bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, Tahun Anggaran 20XX diperkirakan = Rp 13.000.000.000,- maka besaran ambang batas =  $36,56\% \times \text{Rp } 13.000.000.000,- = \text{Rp } 4.752.800.000,-$

Dengan demikian, apabila realisasi biaya BLUD masih dibawah (Rp 13.000.000.000,- + Rp 4.752.800.000,-) = Rp 17.752.800.000,- BLUD dapat melaksanakan belanja dengan melaporkan kepada PPKD. Sedangkan apabila melebihi Rp 17.752.800.000,- wajib mendapatkan persetujuan dari kepala daerah terlebih dahulu dan dituangkan dalam bentuk peraturan kepala daerah.

#### **h. Bab IV, Proyeksi Laporan Keuangan Tahun Yang Dianggarkan**

Proyeksi laporan keuangan BLUD disajikan secara komparatif dengan membandingkan antara prognosa tahun berjalan dengan proyeksi tahun yang dianggarkan, terdiri dari:

- 1) Neraca;
- 2) Laporan operasional;
- 3) Laporan arus kas; dan
- 4) Catatan atas laporan keuangan.

#### **i. Bab V Penutup**

Memuat:

- 1) **Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah**, antara lain: penghapusan piutang, penghapusan persediaan, penghapusan aset tetap, penghapusan aset lain-lain, pemberian pinjaman, kerjasama dengan pihak ketiga, remunerasi pejabat pengelola dan pegawai serta dewan pengawas.

- 2) **Kesimpulan**

Berisikan seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu.

#### **j. Lampiran**

Memuat hal-hal yang perlu dilampirkan sebagai data pendukung dalam penyusunan RBA.

Format Rencana Bisnis dan Anggaran adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran**.

**BAB III**  
**MEKANISME PENGAJUAN**  
**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN**

**1. Badan Layanan Umum Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (BLUD-SKPD)**

RBA yang sudah disusun oleh BLUD, disampaikan kepada PPKD. Dokumen RBA yang telah diterima oleh PPKD untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan penelaahan.

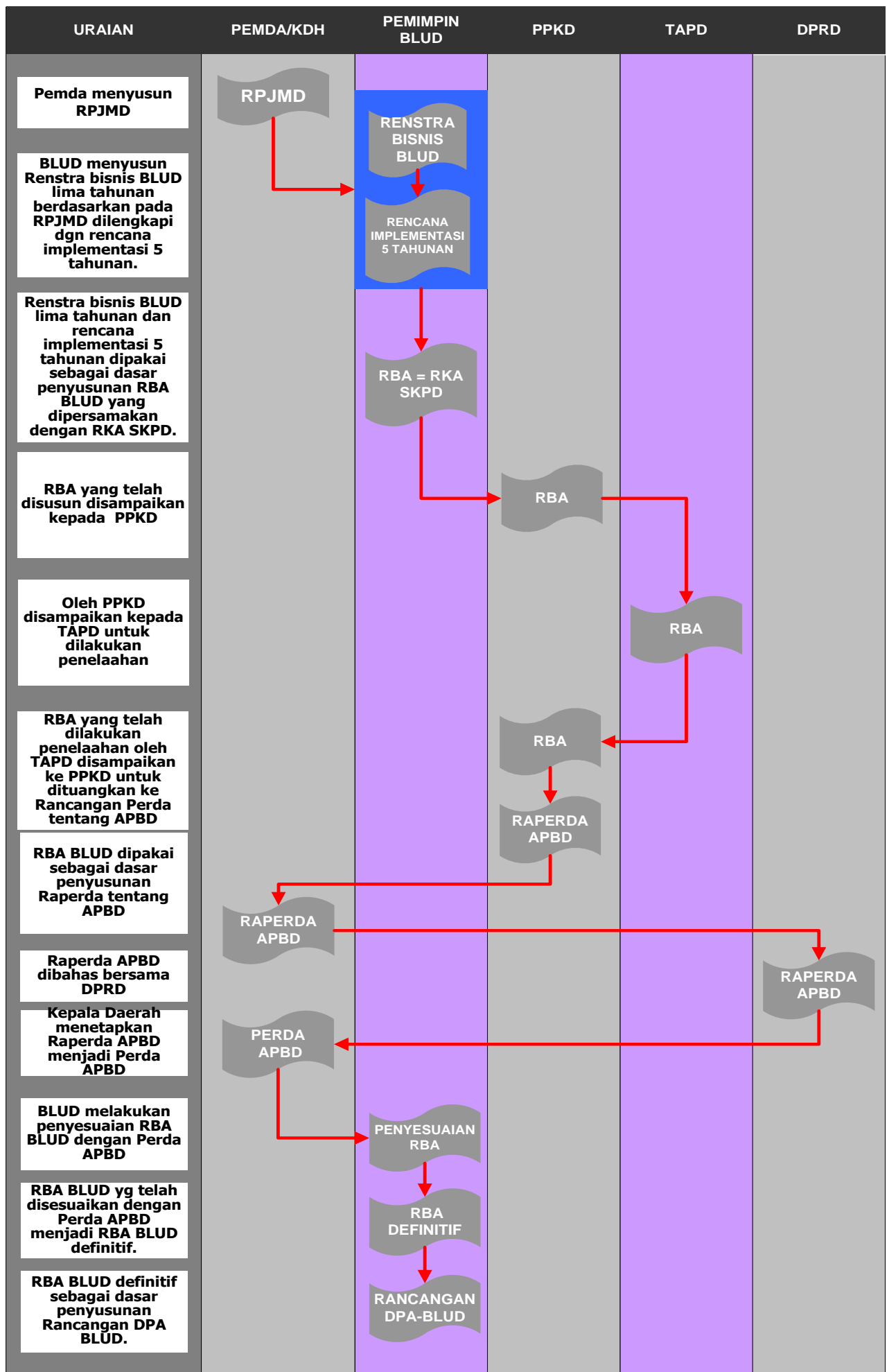
**2. Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (BLUD-Unit Kerja)**

RBA yang sudah disusun disampaikan kepada Kepala SKPD untuk dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD, dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD. Dokumen RKA-SKPD dan RBA yang telah diterima oleh PPKD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan penelaahan.

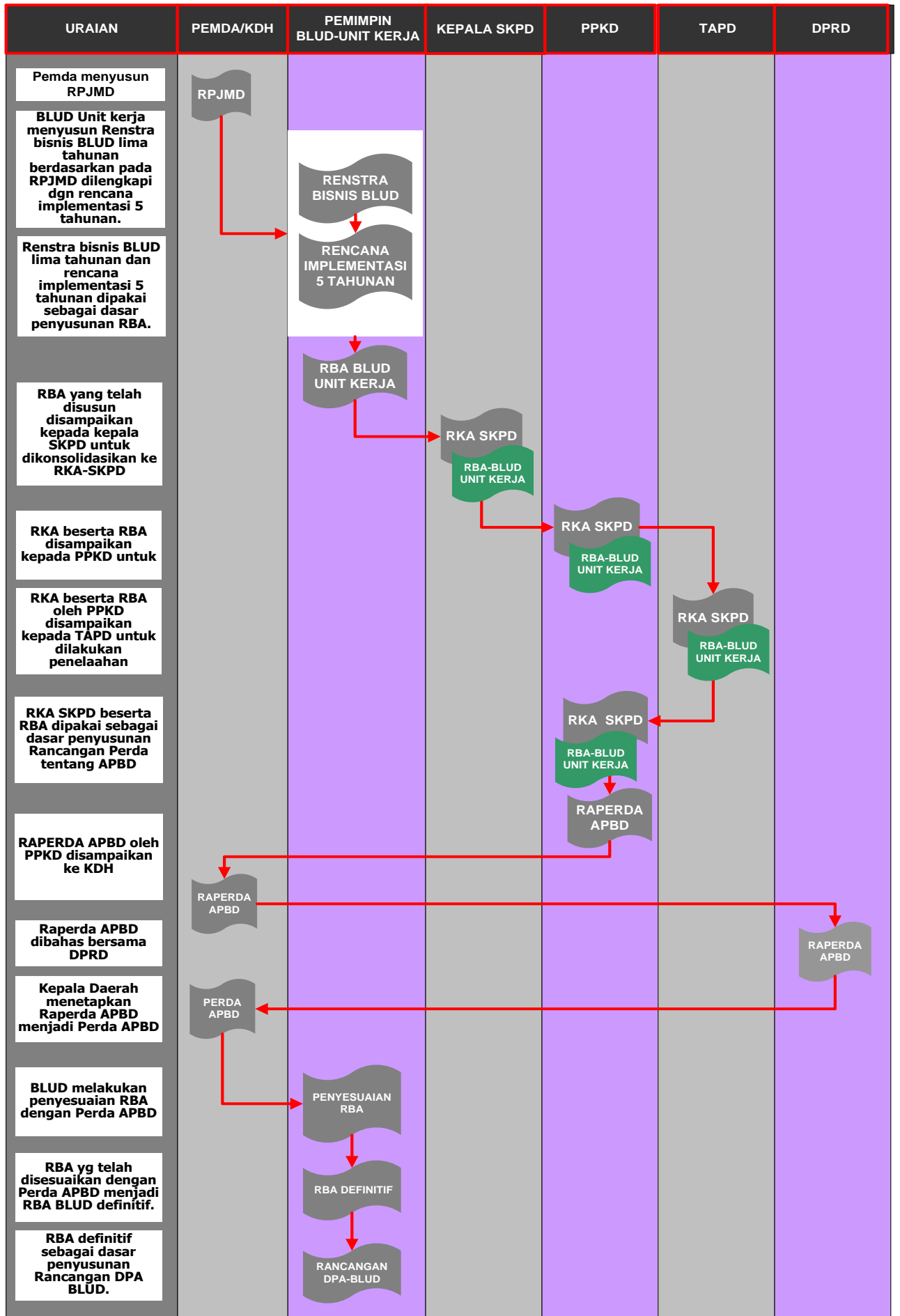
RBA BLUD-SKPD atau RKA-SKPD beserta RBA BLUD-Unit Kerja yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD, selanjutnya disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk menjadi RBA definitif. RBA definitif dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD.

*Bagan alur mekanisme pengajuan RBA untuk BLUD-SKPD atau BLUD-Unit Kerja ke dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai berikut:*

**BAGAN ALUR  
PENGAJUAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
BLUD-SKPD  
KE DALAM PERDA TENTANG APBD**



**BAGAN ALUR  
PENGAJUAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
BLUD-UNIT KERJA  
KE DALAM PERDA TENTANG APBD**





**BAB IV**  
**INTEGRASI/KONSOLIDASI RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN**  
**DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH**  
**TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**ATAU DENGAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Untuk keperluan integrasi/konsolidasi RBA yang telah disusun, seluruh sumber pendapatan, penerimaan, biaya, dan pengeluaran pada BLUD dikonversikan sesuai kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD, dengan menggunakan basis kas.

Langkah-langkah untuk integrasi/konsolidasi, sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan/analisis data pendapatan, biaya dan pengeluaran.
2. Pembuatan kertas kerja konversi dari basis akrual ke basis kas.

*Contoh:*

Konversi Pendapatan BLUD menjadi Pendapatan dalam APBD (dari basis akrual ke basis kas), studi kasus Tahun Anggaran 20xx (*dalam jutaan rupiah*)

- Anggaran pendapatan BLUD Tahun Anggaran 20xx sebesar Rp.100,- (basis akrual).
- Sesuai laporan keuangan 31 Desember (20xx-1) ada piutang sebesar Rp.30,-
- Diperkirakan piutang 31 Desember tahun 20xx sebesar Rp.25,-

Maka cara mengkonversikan pendapatan BLUD menjadi pendapatan APBD adalah sebagai berikut:

Piutang tanggal 31 Desember (20XX-1) = Rp.30,-

Pendapatan TA 20XX = Rp.100,-

Rencana piutang tanggal 31 Desember TA 20XX = Rp.25,-

Maka Pendapatan APBD TA 20XX yang dilaporkan (sebagai basis kas), adalah

= {Piutang tanggal 31 Desember (20XX-1) + Pendapatan TA 20XX} – Rencana piutang tanggal 31 Desember TA 20XX

= (Rp.30+Rp.100) – Rp.25 = Rp.105,-

Apabila terdapat uang muka pada pendapatan BLUD yang diterima pada tanggal 31 Desember 20xx-1 sebesar Rp.15,- dan pada tanggal 31 Desember 20xx sebesar Rp.20,- maka pendapatan dalam APBD tahun anggaran (20xx) menjadi (Rp.105+Rp.20) – Rp.15 = Rp.110,-

*Contoh:*

Konversi Biaya BLUD menjadi Belanja APBD (dari basis akrual ke basis kas), studi kasus Tahun Anggaran 20xx (*dalam jutaan rupiah*):

- Kebutuhan biaya untuk barang/jasa Tahun 20xx sebesar Rp.80,-
- Rencana persediaan akhir tahun 20xx sebesar Rp.10,-
- Sisa Persediaan akhir tahun (20xx-1) sebesar Rp.15,-
- Utang kepada pihak ketiga akhir tahun (20xx-1) sebesar Rp.20,-
- Rencana utang akhir tahun 20xx sebesar Rp.5,-

Maka cara mengkonversikan biaya BLUD menjadi belanja APBD adalah sebagai berikut:

Kebutuhan barang dan jasa TA 20XX = Rp.80,-

Sisa persediaan 31 Desember (20XX – 1) = Rp.15,-

Rencana persediaan 31 Desember 20XX = Rp.10,-

Maka, pembelian barang/jasa tahun anggaran 20xx, adalah

= (kebutuhan barang dan jasa TA 20XX + rencana persediaan 31 Desember 20XX) – Sisa persediaan 31 Desember (20XX-1)

= (Rp.80+Rp.10) – Rp.15 = Rp.75,-

Selanjutnya dihitung konversi pembelian BLUD ke belanja APBD, adalah

= {Pembelian barang/jasa TA 20XX + utang 31 Desember (20XX-1)} – rencana utang 31 Desember 20XX

= (Rp.75+Rp.20) – Rp.5 = Rp.90,-

Maka, belanja barang/jasa tahun anggaran 20xx adalah = Rp. 90,- (sebagai basis kas).

Format tata cara integrasi/konsolidasi RBA dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD atau RKA-SKPD, sebagai berikut:

**1. Pendapatan BLUD ke dalam Pendapatan APBD**

No	Sumber Pendapatan BLUD	Jenis Pendapatan Asli Daerah dalam APBD				Jumlah
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jasa Layanan				XXX	XXX
2.	Hibah				XXX	XXX
3.	Kerjasama				XXX	XXX
4.	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah				XXX	XXX
	<b>TOTAL</b>				XXX	XXX

## 2. Biaya BLUD ke dalam Belanja APBD

No	Biaya	Jenis Belanja dalam APBD				Jumlah
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			
			Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>BIAYA OPERASIONAL</b>					
<b>A.</b>	<b>Biaya Pelayanan</b>					
1.	Biaya pegawai		XXX			XXX
2.	Biaya bahan			XXX		XXX
3.	Biaya jasa pelayanan		XXX			XXX
4.	Biaya pemeliharaan			XXX		XXX
5.	Biaya barang dan jasa			XXX		XXX
6.	Biaya depresiasi			-		-
7.	Biaya pelayanan lainnya			XXX		XXX
<b>B.</b>	<b>Biaya Umum dan Administrasi</b>					
1.	Biaya pegawai <sup>4</sup>	XXX	XXX			XXX
2.	Biaya administrasi kantor			XXX		XXX
3.	Biaya pemeliharaan			XXX		XXX
4.	Biaya barang dan jasa.			XXX		XXX
5.	Biaya promosi			XXX		XXX
6.	Biaya depresiasi			-		-
7.	Biaya umum dan administrasi lainnya			XXX		XXX
<b>II.</b>	<b>BIAYA NON OPERASIONAL</b>					
1.	Biaya bunga			XXX		XXX
2.	Biaya administrasi bank			XXX		XXX
3.	Kerugian penjualan aset			XXX		XXX
4.	Kerugian penurunan nilai			XXX		XXX
5.	Biaya non operasional lainnya			XXX		XXX
	<b>TOTAL BIAYA</b>	XXX	XXX	XXX		XXX

<sup>4</sup> Untuk Belanja PNS

### 3. Penerimaan Investasi ke dalam Pendapatan dan Pembiayaan APBD

NO	JENIS PENERIMAAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH				JENIS PEMBIAYAAN	
		Pajak	Retribusi	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penjualan tanah ..... .....				XXX		
2.	Penjualan gedung ..... .....				XXX		
3.	Penjualan peralatan dan mesin ..... .....				XXX		
4.	Penjualan kendaraan ..... .....				XXX		
5.	Penjualan peralatan kantor ..... .....				XXX		
6	Penjualan surat berharga ..... .....					XXX	
7.	Penjualan sarana fisik lainnya .....				XXX		
	<b>JUMLAH</b>				<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	

**4. Pengeluaran Investasi ke dalam Belanja dan Pembiayaan APBD**

No	Jenis Pengeluaran	JENIS ANGGARAN			JENIS PEMBIAYAAN	
		Belanja pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pembelian tanah ..... .....			XXX		
2.	Pembelian gedung ..... .....			XXX		
3.	Pembelian peralatan dan mesin ..... .....			XXX		
4.	Pembelian kendaraan ..... .....			XXX		
5.	Pembelian peralatan kantor ..... .....			XXX		
6.	Pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan ..... .....			XXX		
7.	Pembelian surat berharga ..... .....					XXX
8.	Pembangunan/ pengembangan sistem informasi ..... .....			XXX		
9.	Pembelian sarana fisik lainnya ..... .....			XXX		
	<b>JUMLAH</b>			<b>XXX</b>		<b>XXX</b>

**5. Penerimaan Pendanaan BLUD ke dalam Pembiayaan APBD**

No	Penerimaan Pendanaan	Pembiayaan dalam APBD		Jumlah
		Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	
1	2	3	4	5
1.	Penerimaan Pinjaman dari .....	XXX		XXX
2.	Penerimaan Pinjaman dari .....	XXX		XXX
3.	Dst.....	XXX		XXX
	<b>TOTAL</b>	<b>XXX</b>		<b>XXX</b>

**6. Pengeluaran Pendanaan BLUD ke dalam Pembiayaan APBD**

No	Pengeluaran Pendanaan	Pembiayaan dalam APBD		Jumlah
		Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	
1	2	3	4	5
1.	Pengeluaran pembayaran pinjaman		XXX	XXX
a.	Pokok pinjaman kepada .....		XXX	XXX
b.	Pokok pinjaman kepada .....		XXX	XXX
	.....			
2.	Dst.....			
	<b>TOTAL</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

Catatan:

Penerimaan dan pengeluaran investasi/pendanaan BLUD yang diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam APBD pada akun Pembiayaan, tercantum dalam organisasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

**7. Pencantuman Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

URUSAN PEMERINTAHAN : X. XX. ....  
 ORGANISASI : X.XX.XX .....

KODE REKENING											URAIAN	Jumlah	Penjelasan
1											2	3	4
X	X	X	X	X	X	X	4				<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
X	X	X	X	X	X	X	4	1			Pendapatan Asli Daerah		
X	X	X	X	X	X	X	4	1	4		Lain-Lain PAD yang Sah		
X	X	X	X	X	X	X	4	1	4	X	Pendapatan BLUD		
X	X	X	X	X	X	X	4	1	4	X	Pendapatan BLUD.....		
											a. Jasa layanan		
											b. Hibah		
											c. Kerjasama		
											d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah		
X	X	X	X	X	X	X	4	1	4	X	Pendapatan BLUD.....		
											a. Jasa layanan		
											b. Hibah		
											c. Kerjasama		
											d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah		

**8. Pencantuman Program, Kegiatan, dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

URUSAN PEMERINTAHAN : X. XX. ....  
 ORGANISASI : X.XX.XX.....

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1										2	3	4
X	X	X	X	X						PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ..... PADA BLUD.....		
X	X	X	X	X	X					<b>Kegiatan Pelayanan</b>		
X	X	X	X	X	X	5	1			<b>Belanja Tidak Langsung</b>		
X	X	X	X	X	X	5	1	1		Belanja Pegawai (PNS)		
X	X	X	X	X	X	5	2			<b>Belanja Langsung</b>		
X	X	X	X	X	X	5	2	1		Belanja Pegawai		
X	X	X	X	X	X	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa		
X	X	X	X	X	X	5	2	3		Belanja Modal		

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X